

RESTRUKTURISASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

**(Kasus Restrukturisasi Pada Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada tim penguji skripsi program studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara**



Oleh :

**YENDRI EFENDRI
2008 / 05192**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

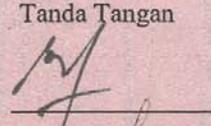
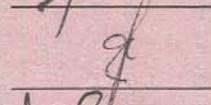
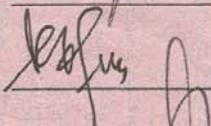
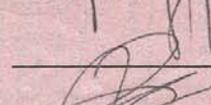
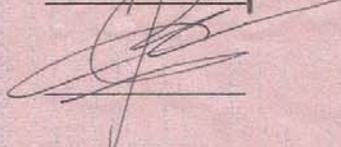
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis 27 Desember 2012 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah
(Kasus Restrukturisasi Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)**

Nama : Yendri Efendri
NIM : 2008/05192
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Desember 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D	
Sekretaris	: Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd	
Anggota	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH. M.Hum	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

YENDRI EFENDRI (2008/05192); RESTRUKTURISASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (Kasus Restrukturisasi Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah karena belum mengacu secara baik pada faktor-faktor penyusunan organisasi pemerintah daerah serta adanya keinginan pemerintah daerah untuk menambah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru yang akan menyebabkan bertambahnya anggaran untuk belanja pegawai dan berkurangnya anggaran untuk belanja publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengapa dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah serta bagaimana dampak restrukturisasi birokrasi dari segi efisiensi birokrasi pemerintah daerah dan efisiensi organisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Informan penelitian ditentukan dengan cara *Purposif Sampling*. Jenis data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi birokrasi dilaksanakan karena beban kerja yang tinggi, luasnya ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, kebutuhan daerah yang semakin meningkat serta adanya keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran karena memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan Faktor-faktor yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah yaitu faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah, faktor karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dan faktor kemampuan keuangan daerah serta dampak restrukturisasi birokrasi dari segi efisiensi birokrasi pemerintah daerah tidak bisa diwujudkan karena adanya penambahan struktur organisasi tata kerja yang baru dan adanya penambahan pegawai baru sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk belanja publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kasus Restrukturisasi Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)” Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik sekaligus sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.

4. Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd sebagai dosen pembimbing II yang tanpa lelah memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, nasehat serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. H. Muhandi Hasan, M.Pd, Bapak Drs. Suryanef, M.Si dan Bapak Aldri Frinaldi, SH.M.Hum selaku tim penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Drs. Nurman, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membimbing penulis selama belajar di UNP.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun dari teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis... ..	10
1. Konsep Birokrasi	10
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	19
3. Konsep Birokrasi Pemerintah Daerah.....	22
4. Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah.....	24
B. Kerangka Konseptual.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	46
1. Kondisi geografis daerah Kabupaten Pasaman Barat	46
2. Gambaran umum demografis Kabupaten Pasaman Barat	47
3. Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat.....	48

4. Deskripsi umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat	49
5. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat	49
6. Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat	52
7. Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat	53
8. Deskripsi umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat	55
9. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.....	55
10. Susunan Organisasi	59
11. Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.....	60
B. Temuan Khusus.....	62
1. Mengapa dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.....	62
2. Faktor-faktor yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwsata	65
3. Dampak restrukturisasi birokrasi dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari efisiensi	73
C. Pembahasan.....	77
1. Mengapa dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat	77
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah	79
3. Dampak restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pasaman Barat	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah APBD kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 s/d 201271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasaman Barat.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 (Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)
- Lampiran 2 (Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat)
- Lampiran 3 (Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial)
- Lampiran 4 (Surat Rekomendasi Tentang Izin Melakukan Penelitian dari Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasaman Barat)
- Lampiran 5 (Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)
- Lampiran 6 (Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, undang – undang ini mendelegasikan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Birokrasi merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Di era otonomi daerah, birokrasi lebih dekat dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintah.

Dalam pasal 128 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berbunyi “*Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah*”, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah yang dibedakan menjadi perangkat daerah propinsi dan perangkat daerah kabupaten dan kota yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, maka prinsip penyusunan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan: (1) Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah (2) Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (3) Kemampuan keuangan daerah (4) Ketersediaan Sumber daya manusia (5) Pengembangan pola kerja sama antar daerah. Dengan dasar peraturan di atas,

maka daerah diberikan keleluasaan untuk menata organisasi perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kedepan, restrukturisasi birokrasi ini dapat berupa unifikasi (penggabungan), destruktifisasi (penghapusan), revitalisasi (mempertegas), pembentukan, efisiensi, span of control (pengendalian), orientasi teknologi dan manusia. Peraturan Pemerintah tersebut jika diimplementasikan di daerah sangat menentukan birokrasi pemerintah daerah, sebab apabila pemerintah daerah akan benar - benar mewujudkan kehendak memberdayakan rakyat maka birokrasi daerah harus eksis dengan performa yang slim, efisien dan efektif (ramping struktur kaya fungsi).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan/mengembangkan nomenklatur, jenis dan jumlah kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada di tingkat daerah. Dengan materi aturan baru yang demikian, secara implisit sebenarnya ada nuansa kesadaran bahwa praktek pembentukan dan pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang *uniform* sudah tidak relevan dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Nuansa implisit lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah bahwa birokrasi yang dibentuk pemerintah daerah haruslah disesuaikan dengan kondisi kontekstual daerah.

Dengan berpedoman kepada hal tersebut diatas, maka sebenarnya bagi daerah – daerah yang memiliki volume dan kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya juga harus memiliki, menetapkan dan

mengembangkan organisasi di lingkungan pemerintahannya yang berbeda pula. Bagi daerah yang memiliki volume dan kompleksitas permasalahan yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah lainnya seharusnya juga mengembangkan kelembagaan organisasi yang kecil pula. Ini berarti bahwa organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang telah eksis selama ini perlu dikaji ulang untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Meskipun peraturan pemerintah tersebut telah mengisyaratkan akan perlunya sebuah bentuk birokrasi daerah yang berbeda dari yang telah ada sekarang ini, namun ternyata dalam realitas pelaksanaannya fenomena - fenomena yang ditampilkan oleh pemerintah daerah dalam merestrukturisasi atau mengembangkan organisasi dilingkungannya masih seperti pada masa sebelumnya. Birokrasi daerah masih saja dibangun dengan gaya struktur lama dan cenderung justru lebih besar dari masa sebelumnya. Dengan adanya tampilan yang demikian maka kehendak untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat akan menemui persoalan, sebab sebagian besar dana pemerintah akan tersedot untuk membiayai birokrasi sedangkan untuk pemberdayaan rakyat menjadi tidak terprioritaskan.

Menurut Rasyid (1997) birokrasi di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Tugas dan fungsi birokrasi di daerah adalah; *Pertama*, memberikan pelayanan umum (*sevice*) yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan penduduk, *Kedua*, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik,

seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melakukan pendidikan, *Ketiga*, menyelenggarakan pembangunan ditengah masyarakat seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, dan sebagainya.

Walaupun otonomi daerah telah menepatkan birokrasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di indonesia, perkembangan birokrasi berjalan secara fluktuatif terutama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Birokrasi di indonesia memperlihatkan kecendrungan kurang baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Menurut Yeremias T. Kaban (2008:240) dalam tubuh birokrasi terdapat banyak masalah, misalnya, pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten masih belum jelas, sehingga menambah beban pemerintah baik dalam konteks finansial maupun tugas pemerintah. Semua masalah ini seakan dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada kejelasan penyelesaiannya sehingga membuat pemerintah daerah menjadi bingung bahkan kurang simpatik terhadap birokrasi pemerintah pusat.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan pecahan dari kabupaten Pasaman, pemekaran kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan wawancara awal pemekaran kabupaten ini dilaksanakan karena wilayah kabupaten Pasaman yang terlalu luas dan tidak bisa mengakomodir semua pelayanan disetiap daerah serta adanya tuntutan dari

masyarakat kepada pemerintah karena masyarakat membutuhkan pelayanan dasar yang layak, adil dan merata di setiap daerah.

Adanya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat daerah yang dapat menjawab tuntutan perkembangan daerah dan perkembangan yang ada di masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan pelayanan dasar yang layak, disamping itu juga perkembangan kabupaten Pasaman Barat yang cukup pesat diperlukan penanganan yang lebih responsif. Maka dilaksanakanlah restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pasaman Barat tersebut yang mana memerlukan kebijakan yang tepat dalam penyesuaian-penyesuaian dari perubahan yang terjadi. Kebijakan yang diambil memerlukan pertimbangan yang matang agar nantinya dapat menghasilkan birokrasi yang mampu memecahkan berbagai persoalan dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Karena pada hakekatnya birokrasi pemerintah daerah yang baik dalam arti mampu mewedahi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat memang merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Riwu Kaho (1988 : 256) bahwa salah satu faktor yang paling menentukan apakah suatu daerah dapat/mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak adalah birokrasi pemerintahan daerah. Dalam arti daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan adanya birokrasi (kelembagaan) yang baik pula.

Restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pasaman Barat ini, berdasarkan wawancara

awal dilaksanakan karena meningkatnya kebutuhan daerah dan banyaknya beban kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata , sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Mildasari sebagai Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan mengatakan bahwa;

Dalam restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pasaman Barat dilakukan karena banyaknya beban kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan luasnya ruang lingkup tugas dan fungsi dari dinas tersebut, dan kompleksnya permasalahan serta kebutuhan daerah yang semakin meningkat. (wawancara, tanggal 10 Oktober 2011)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Hasiholan sebagai Kabag organisasi mengatakan bahwa;

Restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kabupaten Pasaman Barat ini melakukan penambahan struktur organisasi seperti Dinas dari 14 menjadi 15 karena Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dipecah menjadi 2 Dinas yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Kebudayaan Pariwisata.(wawancara, tanggal 10 Oktober 2011)

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah mendasar adalah bahwa pada dasarnya pelayanan yang baik itu adalah ramping struktur dan kaya fungsi, tapi dalam kebijakan restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat kelihatanya untuk menambah struktur organisasi, yang mana kebijakan tersebut akan menambah biaya pengeluaran yang besar dari APBD terhadap anggaran pengeluaran untuk biaya pegawai dan secara langsung akan berdampak terhadap pengurangan anggaran untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu muncul keinginan untuk melakukan penelitian tentang

“Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kasus Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di pemerintahan kabupaten Pasaman Barat.
3. Restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah belum mempertimbangkan faktor-faktor penyusunan organisasi perangkat daerah.
4. Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat.
5. Restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan harapan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat kemampuan penulis yang terbatas maka yang menjadi batasan masalahnya adalah Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat?
2. Faktor-faktor apa yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata?
3. Bagaimana dampak restrukturisasi birokrasi dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dilihat dari segi efisiensi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui mengapa dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendasari dilaksanakan restrukturisasi birokrasi pemerintah daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Mengetahui bagaimana dampak restrukturisasi birokrasi dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dari segi efisiensi.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam memahami konsep keilmuan dalam administrasi negara terutama yang terkait dengan birokrasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan restrukturisasi birokrasi.